

**ANALISIS PENYALURAN DANA BANTUAN UMKM (BANPRES) DINAS KOPERASI  
KOTA MEDAN TERHADAP PENGUSAHA MIKRO KECIL  
DI KOTA MEDAN  
( Studi Kasus Para Pengusaha Mikro di Kecamatan Medan Timur )**

**Dewi Sundari<sup>1</sup>, M. Guffar Harahap<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Al Washliyah (UNIVA) Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
dewisundari437@gmail.com

**Abstract:** *The impact that has occurred due to the Covid-19 Pandemic is very much felt for all Indonesian people and society, especially for people who earn from micro-enterprises who are getting worse day by day. To overcome this problem and minimize it, the government takes an action. One of the steps taken by the government is to provide UMKM assistance (Banpres) so that the community can be supported and assisted in saving and maintaining their business during the Covid-19 Pandemic. This research aims to determine the effect of this Banpres assistance on the UMKM community affected by Covid-19. To find out how the government works specifically for the City Cooperative Service in carrying out assistance programs to the UMKM community. The object of research is the UMKM community in Medan City (Case Study of the Glugur Darat Community, East Medan District). Based on the research in the field, it can be concluded that the Banpres Grant Program ran smoothly and was very successful in its distribution because it was received directly by the community of micro business actors through banks that had been appointed by the Cooperatives Service. Which is expected by the government because basically most of the UMKM recipients do not use these funds for business development, but the aid funds are allocated or used for the consumptive needs of the community.*

**Keywords:** *Banpres, Cooperative Service, UKM*

**Abstrak:** Dampak yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 ini sangat terasa bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia, Terlebih pada masyarakat yang berpenghasilan dari usaha mikro yang semakin hari semakin terpuruk. Untuk menanggulangi masalah ini dan meminimalisir maka pemerintah mengambil suatu tindakan. Adapun salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan bantuan UMKM (Banpres) agar masyarakat dapat bisa tertopang dan terbantu dalam menyelamatkan serta mempertahankan usahanya pada masa Pandemi Covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bantuan Banpres ini terhadap masyarakat UMKM yang terdampak Covid -19 . Untuk mengetahui cara kerja pemerintah khusus Dinas Koperasi Kota dalam menjalankan program bantuan kepada masyarakat UMKM. Adapun objek penelitian yaitu masyarakat UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Masyarakat Glugur Darat Kecamatan Medan Timur). Berdasarkan penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa Program Pemberian Banpres berjalan dengan lancar dan sangat sukses dalam penyalurannya karena diterima langsung oleh masyarakat pelaku usaha mikro melalui bank yang telah ditunjuk oleh Dinas Koperasi namun sangat disayangkan bahwa dalam pengembangan Dana Bantuan UMKM tersebut masyarakat belum dapat menjalankan semesrtinya sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah karena pada dasarnya sebagian besar penerima UMKM tidak mempergunakan dana tersebut sebagai pengembangan usahanya akan tetapi dana bantuan tersebut di alokasikan atau dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif masyarakat itu tersebut.

Kata Kunci : Banpres, Dinas Koperasi, UKM

## Pendahuluan

Sejarah membuktikan bahwa pada saat terjadi krisis global ekonomi dan kesehatan sejak awal tahun 2020 telah membuat usaha berskala besar tidak mampu menahan terpaan krisis tersebut. Dimana pada saat ini banyak perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan atau pailit yang disebabkan oleh karena sulitnya dan mahal nya bahan baku impor. Tidak hanya harga bahan baku yang naik drastis tetapi pajak impor dari bahan baku tersebut juga ikut naik. Selain itu, kebangkrutan usaha skala besar terjadi karena tidak adanya perputaran ekonomi dan kerjasama dengan pihak luar yang sangat terbatas di karena banyaknya negara luar menutup daerah masing-masing dari kunjungan orang asing yang akan masing ke manca negara masing dan terutama rendah daya beli masyarakat khususnya dalam negeri sendiri. Selain itu, kebangkrutan usaha skala besar terjadi karena meningkatnya cicilan utang karena naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar.<sup>1</sup>

Pada saat usaha berskala besar mengalami keterpurukan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hanya sebagian saja mampu bertahan dari krisis tersebut. Hal ini disebabkan oleh (1) sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang di hasilkan. Sebaliknya, kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.(2) sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari Bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan bermasalah, maka usaha skala besar ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan UMKM mampu bertahan. Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah. Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu, UMKM hadir sebagai suatu solusi dari perekonomian yang sehat<sup>2</sup>. Hal ini membuktikan bahwa sektor UMKM memiliki keunggulan dan berpotensi untuk dikembangkan.

Kota Medan merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu sebesar 2.983.868 jiwa pada tahun 2020. Dengan jumlah UKMK sebanyak 242.890 unit.

### PENYALURAN DANA BANPRES DI KECAMATAN KOTA MEDAN TAHUN 2019

No	Kecamatan.	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(5)
1.	Medan Tuntungan	85 613
2.	Medan Johor	132 012
3.	Medan Amplas	123 850
4.	Medan Denai	146 061
5.	Medan Area	98 992

6.	<b>Medan Kota</b>	74 439
7.	<b>Medan Maimun</b>	40 663
8.	<b>Medan Polonia</b>	55 949
9.	<b>Medan Baru</b>	40 540
10.	<b>Medan Selayang</b>	106 150
11.	<b>Medan Sunggal</b>	115 785
12.	<b>Medan Helvetia</b>	150 721
13.	<b>Medan Petisah</b>	63 374
14.	<b>Medan Barat</b>	72 683
15.	<b>Medan Timur</b>	111 420
16.	<b>Medan Perjuangan</b>	95 882
17.	<b>Medan Tembung</b>	137 178
18.	<b>Medan Deli</b>	181 460
19.	<b>Medan Labuhan</b>	117 472
20.	<b>Medan Marelan</b>	162 267
21.	<b>Medan Belawan</b>	98 113
<b>Kota Medan</b>		<b>2 210 624</b>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu entitas pelaku ekonomi yang eksistensinya mendominasi terhadap perekonomian bangsa, baik diperkotaan maupun pedesaan. Menurut Urata (2000), peran UMKM dilihat dari kedudukannya yaitu sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, seperti penyedia lapangan kerja terbesar, berperan dalam hal pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan inovasi, dan untuk UMKM yang sudah mampu melakukan perdagangan internasional UMKM tersebut tentu mampu memberikan sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor. Dilihat dari Kedudukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional yang sangat penting, terutama karena jumlahnya yang banyak serta perannya terhadap penyerapan tenaga kerja yang begitu besar dan kontribusinya terhadap PDRB nasional. Disamping itu UMKM juga memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap krisis ekonomi, sebagaimana pada saat terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 an, dimana kondisi waktu itu usaha kecil, mikro, dan menengah terbukti lebih kebal daripada perusahaan besar yang justru banyak mengalami kebangkrutan.

Di tingkat daerah khususnya kota Medan, dapat melihat bahwa secara umum pertumbuhan perekonomian kota Medan tidak terlepas dari kontribusi UMKM. Hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM-nya yang cukup banyak, dengan jumlah lebih kurang 242.890 unit UMKM yang terdiri dari jenis usaha perdagangan jasa, industri kerajinan dan aneka usaha lainnya, dimana kelembagaannya

belum tertata secara maksimal baik itu soal perizinan maupun aspek legalitasnya sehingga jumlah UMKM di Kota Medan masih belum pasti. Adapun jenis-jenis UMKM yang ada di Kota Medan yaitu usaha dibidang kuliner, jasa percetakan, pembuatan kerajinan tangan dan sebagainya .

Proporsi jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah mencapai 99,8 % dari total usaha ekonomi yang ada di kota Medan. Artinya, jumlah UMKM mencapai hampir 500 kali lipat dari jumlah usaha besar. Meski demikian, kontribusi UMKM ke kota Medan diperkirakan baru mencapai 39,8 % sedangkan usaha besar mencapai 60,2 %. Hal ini menunjukkan kuatnya sektor usaha besar dan masih terbatasnya sektor UMKM (BPS Sumatera Utara, 2014).

**Penyaluran Dana  
Banpres Untuk UMKM Kecamatan Medan Timur  
Tahun 2020**

No	Nama Lengkap	Kegiatan	Jenis Usaha	Lokasi
1.	<b>JAMIAH</b>	Banpres	Nasi Goreng,	KOTA MEDAN, Kecamatan Medan Timur
3.	<b>TIWI</b>	Banpres	Ponsel	KOTA MEDAN, Kecamatan Medan Timur
4.	<b>IYET :</b>	Banpres	Sarapan Pagi	KOTA MEDAN, Kecamatan Medan Timur
5.	HENDRIK	Banpres	Foto Copy	Kota Medan Kecamatan Medan Timur
6.	<b>HENDRA TARIGAN</b>	Banpres	Percetakan	KOTA MEDAN, Kecamatan Medan Timur
7.	<b>AGAM</b>	Banpres	Kedai Smapah	KOTA MEDAN, Kecamatan Medan Timur

Sebagai salah satu kecamatan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Kecamatan Medan Timur telah berkembang UMKM dengan jenis usaha seperti :, kue, makanan dan minuman. Keberadaan UMKM di Kecamatan Medan Timur Kota Medan memberi dampak positif bagi pengentasan masalah kemiskinan dan pengangguran dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.

Menurut Badan Statistik bahwa perekonomian Sumatera Utara Menurun 1,07 persen ( 17 Februari 2021 ) ini terjadi di karena situasi Pandemi sekarang ini yang masih merambah dan juga meresahkan pada masyarakat terutama pemerintah khususnya dalam penangungalangannya karena masih tingginya tingkat kematian yang diakibatkan Covid 19 ini walaupun sudah dilakukan

penerapan protokol kesehatan pada masyarakat, perusahaan dan instansi-instansi pemerintah dan tindakan yang terakhir dilakukan oleh pemerintah yaitu pemberian / penyuntikan vaksin kepada para pegawai pemerintah dan sebagian masyarakat kecil namun semua ini belum juga dapat memaksimalkan perkembangan usaha masyarakat terutama pelaku bisnis ekonomi mikro ini dapat kita lihat dilapangan bahwa perekonomian penduduk Sumatera Utara khususnya Kota Medan belum juga stabil dan normal namun demikian sebagai manusia harus melanjutkan kehidupan walaupun dengan keadaan sedikit mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha mereka khususnya pelaku usaha mikro. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global yang terjadi pada saat pandemi ini masih berlangsung., UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain namun beda hal pada masa Pandemi ini UMKM di hadapkan pada amasalah sulit menyalurkan usahanya dan mengembangkan ditambah sulitnya mendapatkan bahan baku bagi usaha menengah dan juga tingginya harga bahan baku khususnya bagi pengusaha mikro kecil

Masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, kelemahan dalam struktur permodalan, kelemahan dalam bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia, keterbatasan jaringan usaha kerja sama antar pengusaha kecil, iklim usaha yang kurang kondusif, pembinaan yang kurang terpadu serta kurangnya kepercayaan masyarakat dan kepedulian terhadap usaha kecil.

Menurut Dipta dalam Julita (2015) menyampaikan apabila Indonesia tidak mendorong daya saing dan nilai tambah atas barang/produk yang diproduksi, maka Indonesia dapat kehilangan perannya di kawasan dan menjadi objek kemajuan pembangunan di kawasan tanpa memperoleh keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, program kebijakan penguatan daya saing telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, antara lain penguatan UKM nasional. Hal tersebut penting untuk memfasilitasi UMKM nasional yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan kreatif, serta mampu melakukan perluasan pasar dari Komunitas Ekonomi ASEAN.

Hasil penelitian Yuli Rahmini Suci menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga sulit berkembang antara lain ketidakmampuan dalam manajemen, lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan, kurang berpengalaman, dan lemahnya pengawasan keuangan dan juga hambatan yang terjadi di luar dari perkiraan pelaku UMKM tersebut misalnya seperti yang terjadi pada saat pandemi ini. Menghadapi persoalan-persoalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah dikemukakan di atas, pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara telah melakukan berbagai upaya yang sekaligus untuk membantu para pelaku bisnis Mikro Kecil untuk dapat bertahan pada masa-masa sulit disaat

pandemi ini untuk dapat bertahan walaupun gerakan sangat lambat sekali yaitu hanya seper sekian persen dari perkembangan UMKM sebelum masa pandemi ini, untuk itu pemerintah mengambil langkah yang cepat dengan cara memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar bisa tetap berjalan dengan program Banpres yang memberikan bantuan berupa dana sebesar 2,4 juta per UMKM. Fenomena berkembangnya UMKM di Kecamatan Medan Timur Kota Medan ini dianggap memberi pengaruh terhadap pengembangan ekonomi wilayah di Kecamatan Medan Timur Kota Medan terutama pada masa Pandemi Covid 19 ini.

### **Metodologi**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif . Materi diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisis sehingga tujuan dari penelitian dapat dicapai dengan baik dan maksimal. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat pelaku Bisnis Usaha Mikro Kefil di Kecamatan Medan Timur yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi Kota Medan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil dan analisa maka penelitian mengambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi Kota Medan dalam membantu pada pelaku ekonomi Mikro di Kec. Medan timur dengan memberikan Dana Banpres secara langsung ke rekening para Pelaku UMKM secara langsung tanpa ada pungutan biaya dan PPN serta bunga karena bantuan ini bukan merupakan suaau pinjamn namun sebagai bantuan untuk para pelaku UMKM dalam mempertahankan usahanya pda masa Pandemi Covid 19 agar perekonomian rakyat bisa tertopang dan terbantu dengana adanya program bantuan dana Banpres ini

Untuk menanggulangi masalah ini dan meminimalisir maka pemerintah mengambil suaau tindakan. Adapun salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan bantuan UMKM kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro dan juga pemberian bantuan kepada seluruh pelajar dalam pemberian biaya tambahan uang sekolah, buku dan administrasi lainnya yang dikenal dengan PKH. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ekonomi mikro memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi. Bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan. Serta berinteraksi di dalam pasar. Diambil dalam buku Ekonomi Mikro (2017) karya Sigit Sardjono, berikut contoh penerapan ekonomi mikro yang juga ada di Indonesia, di antaranya:

Dalam Menjalan Program Bantuan UMKM Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) menargetkan sebanyak 1,5 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapatkan dana bantuan Rp2,4 juta dari program Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM).

Tujuan pemberian stimulus ini adalah untuk membantu UMKM berkembang setelah terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penguatan Ekonomi Penerima Manfaat UKM/IKM Provinsi Sumut Ritha F Dalimunthe secara virtual.

Pada dasarnya, alokasi dana untuk UMKM ini ditujukan untuk 2 juta usaha. Namun sampai saat ini baru terpenuhi 11 persen. Hal tersebut membuat Pemprov Sumut merubah target pencapaian menjadi 1,5 juta usaha. BPUM ini merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang telah berjalan sejak Juni 2020.

Ini merupakan bantuan dari Presiden yang sudah berjalan sejak bulan Juni silam, bantuan yang diperuntukkan bagi pelaku UKM atau IKM. Sebenarnya Sumut itu diberikan alokasi hingga 2 juta UKM atau IKM, tapi sampai saat ini baru terpenuhi 11%. Jadi kita targetkan untuk 1,5 juta UKM atau IKM dulu yang harus terpenuhi,"

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, ada sebanyak 355.502 UKM atau IKM yang sudah diajukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota se-Sumut, namun yang lolos verifikasi data di Kementerian Koperasi dan UKM RI sebanyak 40.087 UKM/IKM.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Ridha Haykal Amal menegaskan program BPUM ini bukan program pinjaman, melainkan dana hibah yang diberikan Presiden RI kepada UMKM yang terdampak Covid-19 di wilayah Indonesia.

"Banpres Produktif ini hibah, bukan pinjaman. Bantuan ini jadi modal kerja buat pelaku usaha mikro dan bagian dari perluasan program Pemulihan Ekonomi Nasional,"

Mengenai mekanisme pengajuan permohonan, menyampaikan terdapat beberapa syarat untuk mendaftar sebagai penerima BPUM, diantaranya pelaku usaha harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu, seperti menyertakan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Nomor Rekening Tabungan dan Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha.

Semua kelengkapan tersebut diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota yang selanjutnya baru diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut.

Tapi pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance menilai anggaran sebesar Rp22 triliun tersebut tidak menyelesaikan persoalan utama para pelaku usaha yakni hilangnya pasar akibat lemahnya daya beli masyarakat.

- Covid-19: Stimulus ekonomi berbelit dan penyaluran lamban, UMKM cemas bakal terpuruk

- Virus corona: Sejumlah usaha kecil dan menengah 'tutup hingga rumahkan karyawan', pemerintah diminta 'dahulukan bantuan bagi usaha strategis'
- Virus corona: UMKM diterjang pandemi Covid-19 sampai 'kembang Kempis'

Intan seorang pedagang makanan penjual mie balap di Kota Medan, bercerita sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pendapatannya menurun drastis. Jika sebelumnya ia bisa mengantongi Rp1 juta sampai Rp1,5 juta setiap hari sekarang tidak pernah lebih dari Rp500.000.

Agar usahanya tetap bertahan, perempuan 46 tahun ini mengurangi porsi jualan dagangan agar tidak mengalami kerugian. Kenapa demikian karena tidak ada income dalam masyarakat disebabkan banyak usaha mikro yang tutup dan para masyarakat banyak yang di PHK sehingga kondisi keuangan masyarakat sangat minim.

Seorang Ibu rumah tangga Jamiah, meskipun berat dan pusing. Yang penting *dicukup-cukupin aja*. Kalau dulu beli ikan sampai tiga kilogram, sekarang cuma satu kilogram. Yang penting bisa *muter*," dalam memenuhi jualan kedai nasinya penjelasan dari ibu Hamidah.

Pak Hendra seorang pengusaha Percetakan dan photo copy di kawasan daerah Glugur Kecamatan Medan timur tepat sekitar Universitas Muhammadiyah bahwa usahanya di gelutinya yang termasuk kepada UMKM sangat mengecewakan dan hampir tidak dapat diharapkan lagi, seperti yang kita ketahui bahwa usaha percetakan identik dengan buku dan kertas – kertas yang selalu berhubungan dengan kantor terutama pendidikan, sekolah-skolah dan kampus. Namun kenyataan pada saat Covid 19 ini pemerintah melakukan program belajar mengajar dengan on line (daring) sehingga seluruh sekolah dan kampus di tutup yang mengakibatkan usaha percetakan terasi sepi dengan pelanggan yang biasanya setiap hari menghasikan Rp. 1 Jt sampai dengan Rp. 1,5 Juta / hari dan semua keadaan ini sangat besar pengaruh terhadap kelanjutan usaha seluruh UMKM yang bergerak di bidang Percetakan atau photo copy. Sejak pendapatannya anjlok, ia pun harus memangkas beberapa kebutuhan sehari-hari, termasuk mengurangi jatah bulanan sekolah anaknya di luar kota.

"Pengeluaran perbulan sekarang Rp4 juta sampai Rp5 juta, itu sudah diirit-irit *banget*. Kalau *nggak* begitu ya bisa sampai Rp8 juta. Yang biasa kirim buat anak sekolah Rp2 juta sekarang cuma Rp1 juta karena harus dibagi-bagi di sini juga," sambungnya.

"Pokoknya menurut mereka *pas-pasan sekali*, *bener-bener* pas-pasan, kita *nggak* bisa apa-apa. dan mereka berharapa kembali bisa kembali *kayak* dulu."

Tantangan yang dihadapi dalam Penyaluran Dana Banpres oleh instansi terkait khususnya Dinas Koperasi Kota Medan yaitu karena tumpang tindihnya data yang kurang akurat sehingga menyulitkan pemerintah khususnya Dinas Koperasi UMKN Kota Medan untuk memvalidkannya sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan dalam pengajuan dan pendaftaran

calon UMKM yang ingin mendapatkan bantuan Banpres ini datang berbondong-bondong ke kantor Dinas Koperasi serta kurangnya kedisiplinan dan kesabaran masyarakat dan juga tidak adanya pengaturan yang lebih spesifik sehingga sempat terjadi keributan di Kantor Dinas Koperasi Kota Medan, karena Dinas Koperasi Kota Medan sebelum yang tidak memperkirakan jumlah UMKM yang datang setiap harinya, namun dengan melihat situasi ini dan kesalahan ini maka Pihak Dinas Koperasi melakukan suatu aturan yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penerima Banpres secara tegas dan Teratur.

Program pemberian bantuan dana UMKM oleh Pemerintah melalui dinas Koperasi berjalan dengan lancar dan aman walaupun sebagian pengusaha mikro di kota Medan masih banyak tidak mendapatkan bantuan UMKM dari Pemerintah tersebut karena tidak memenuhi kriteria sebagai penerima Banpres tersebut.

Disini Penulis mengamati dilapangan bahwa Program Pemerintah atau Bapres yaitu pemberian dana UMKM ini kepada masyarakat pelaku usaha mikro di kota Medan sangat menggembirakan para masyarakat yang menerimanya karena menurut mereka bantuan tersebut sedikit membantu para pelaku usaha mikro namun di dalam prakteknya bahwa penggunaan bantuan UMKM tersebut banyak disalah gunakan oleh penerimanya terutama pelaku usaha mikro.

Adapun alasan penulis berasumsi demikian karena penulis meninjau kelapangan bahwa dana bantuan UMKM yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat pelaku usaha mikro sebagian besar di gunakan untuk dana konsumtif mis : pembayaran uang sekolah, uang kuliah dan untuk memberi beli yang bukan untuk menambah persediaan barang yang diperlukan dalam melanjutkan usaha Mikronya, misalnya sebagai besar digunakan untuk membeli HP. Anakanya untuk keperluan untuk belajar on line (daring) yang kebetulan rusak atau belum ada, karena saat sekarang ini tidak dapat diharapkan dana dari hasil usaha seperti waktu lalu sebelum masa covid 19 dan juga untuk membayar sewa rumahnya atau hutang yang telah menumpuk pada masa pandemi di awal.

## **Kesimpulan**

Dengan melihat kenyataan di lapangan penulis dapat menyimpulkan Program Pemberian Bapres sangat sukses dalam penyalurannya karena diterima langsung oleh masyarakat pelaku usaha mikro melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Dinas Koperasi namun sangat disayangkan bahwa dalam pengembangan Dana Bantuan UMKM tersebut masyarakat belum dapat menjalankan sebagaimana mestinya seperti yang diharapkan oleh pemerintah karena pada dasarnya sebagian besar penerima UMKM tidak mempergunakan dana tersebut sebagai pengembangan usaha mereka sehingga dapat berlanjut dan terselamatan dari masa Covid 19 ini tetapi dana tersebut di alokasi

untuk keperluan yang lain dan ini merupakan suatu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memaksimalkan dana tersebut untuk keperluan usaha mereka.

## Referensi

Anggraini, Dewi dan Nasution, Syahrir Hakim. 2013. *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan* (Studi Kasus Bank BRI. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol.1.No(3).Hal:105-116.

Adelin, Vani. 2013. "Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi" (Studi Empiris Pada BUMN Di Kota Padang).WRA, vol. 1, No. 2, Oktober 2013

Darwanto. 2013. Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi Dan Kreativitas (Strategi Penguatan Property Right Terhadap Inovasi Dan Kreativitas). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol.20.No (2). Hal:1 42-149.

Julita, 2015. Pengaruh Debt To Equity Ratio dan Debt to Assets Ratio terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Transformasi Yang Terdaftar Di Bursa efek Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 282-333-1. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mariana kristianti. "website media pemasaran produk-produk unggulan UMKM di di kota Semarang". Dalam jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) vol 13 No. 2, April 2015, h. 186

Saputro.J.W., Handayani, Putu Wuri., Hidayanto, Achmad Nizar., dan Budi, Indra. 2010. Peta Rencana (ROADMAP) Riset Enterprise Resource Planning (ERP) Dengan Fokus Riset Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UMK) Di Indonesia. Journal of Information Systems. Vol.6.No(2). Hal:140-145.

Sholhuddin, Muhammad. 2013. Tantangan Perbankan Syariah Dalam Perannya Mengembangkan UMKM. Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Paper Sancall. Surakarta. Hal:496-500.

Supriyanto. 2006. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Pendidikan. Vol.3.No(1). Hal:1-16

Undang-Undang No.20 Pasal 1 dan Pasal 6 Tahun 2008 <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl56041/node/28029> (diakses 22/1/2017).

LPPI dan BI. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal:1-100. [http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil Bisnis UMKM.pdf](http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf) (diakses 22/1/2017)

Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia " , Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 , h. 51